

Kapasitas Bisnis Pemerintah Desa dalam Perspektif *Business-Government Relationship* Pasca Implementasi Otonomi Desa (Kasus di Kabupaten Banyumas)

Denok Kurniasih^{1,*}, Paulus Israwan Setyoko², M.Imron³

¹ Jurusan Administrasi Publik, Fisip, Unsoed, Indonesia

¹ denokkurniasih@unsoed.ac.id*; ² israwan_map@yahoo.com, ³ imron@unsoed.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2020-06-24

Revised 2020-06-26

Accepted 2020-06-26

Keywords

Business Government Relationship

Government's Business Capacity

Business Commitment

Public Sector Entrepreneurship

ABSTRACT

The Indonesian Governments policies after the implementation of village autonomy are directed to villages business development. Village governments duties and functions are not only related to administrative matters anymore, but also in operation of villages business. This shows that there is a developing business commitment in Indonesia. The research result shows that the Business-Government Relationship in Indonesia has changed from one way to mutual interaction, as shown with the development of Public Sector Entrepreneurship and business commitment in village government environment. Both factors evidently improve the capacity of business, which begins to be developed by the Indonesian Government at all levels. The development of Public Sector Entrepreneurship is shown with the business creativity, business cooperation, and professionalism of village government in governments business management. Meanwhile, local governments business commitment is shown with support of policies, funding and human resources in governments business management. Governments business capacity is indicated by efficiency, effectiveness and economy (value for money) achieved by governments business unit. In Indonesia, particularly in Banyumas Regency, village autonomy has given opportunity for the development of Business-Government Relationship at the local level.

PENDAHULUAN

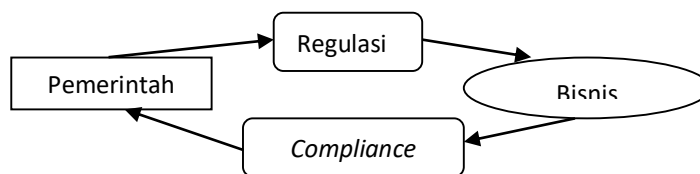
Sektor bisnis masih menjadi primadona dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi masyarakat (Acs & Szerb, 2007). Pandangan bahwa sektor publik harus banyak belajar dari sektor privat pada akhirnya terus dibuktikan seiring dengan dorongan agar pemerintah memiliki semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*). Pentingnya kewirausahaan juga disampaikan oleh Barzelay & Thompson (2006) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya hubungan antara sektor privat dan sektor publik semakin banyak dipertimbangkan untuk menyelesaikan masalah publik (McGahan, et.al, 2013; Klein, et.al, 2010; Reinhart and Rogoff, 2009).

Pemerintah Indonesia saat ini fokus melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah desa untuk menjalankan fungsinya. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, upaya pemberdayaan masyarakat desa telah menemukan caranya. Salah satu cara yang didorong melalui kebijakan otonomi desa adalah pengembangan sektor bisnis pemerintah desa. Pengembangan bisnis di level pemerintah desa diharapkan dapat memberikan rangsangan bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki desa agar dapat dimanfaatkan sebagai modal bisnis yang mendatangkan keuntungan. Tuntutan ini sekaligus menggambarkan bahwa semangat kewirausahaan telah berkembang dan menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di desa.

Sebelum adanya otonomi desa, keterkaitan antara sektor bisnis dan pemerintah hanya bersifat administratif. Peran pemerintah di masa sebelum otonomi desa masih berfokus pada upaya melakukan pengaturan melalui kebijakan yang mendorong berkembangnya sektor bisnis. Artinya relasi yang



dibangun masih bersifat satu arah. Kontribusi sektor bisnis belum dimaknai penting oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 1. Business-Government Relationship sebelum otonomi

Pada perkembangannya Pemerintah Indonesia telah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun kawasan perdesaan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mengembangkan sektor bisnis, pemerintah tentu dapat belajar dari sektor privat. Dijelaskan oleh Inwood (2012) bahwa perjuangan organisasi publik saat ini adalah bagaimana membawa kultur manajemen sektor privat ke dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik (Inwood, 2012). Di level desa tentu ini menjadi tantangan yang sangat berat. Namun demikian, seiring dengan implementasi otonomi desa, perkembangan unit-unit bisnis di tingkat desa meningkat drastis. Sampai dengan tahun 2017 jumlah unit bisnis yang dimiliki desa di Indonesia telah mencapai 18.446 unit dari 74.053 desa yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 2018, jumlah unit bisnis di level desa terus mengalami peningkatan menjadi 30.000 unit, dan belum sampai setahun sudah meningkat sebesar 9.000, sehingga total jumlah BUMDes tahun 2018 adalah sebanyak 39.000. Angka tersebut diklaim telah melebihi target Pemerintah Indonesia sebesar 5.000 unit bisnis selama lima tahun. Dorongan masif melalui kebijakan pemerintah telah menggugah semangat pemerintah desa untuk mengembangkan berbagai sektor usaha desa.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk membangun perekonomian masyarakat sektor publik tentu tidak akan bisa lepas dari pengaruh sektor bisnis atau privat. Pemberian otonomi desa diharapkan dapat membawa angin segar bagi peningkatan kualitas hubungan antara sektor bisnis dan pemerintah. Pemerintah desa telah mulai mengembangkan inovasi, perubahan, dan upaya mengembangkan kualitas sumberdaya manusia untuk menangkap peluang bisnis yang dapat dikembangkan di desa. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara bisnis dan pemerintah dalam perspektif organisasi pemerintah. Dengan menguji pengaruh Public Sector Entrepreneurship dan Business Commitment pemerintah desa terhadap kapasitas bisnis yang sedang dijalankannya oleh pemerintah desa dapat diketahui level perkembangan relasi bisnis dan pemerintah.

KERANGKA TEORI

Relasi Bisnis dan Pemerintah

Keterkaitan antara pemerintah dengan sektor bisnis masih menimbulkan polemik khususnya dalam penelitian tentang kewirausahaan (Dai & Si, 2018). Selama ini pemerintah sangat identik dengan kerja sosial dan jasa tanpa mengedepankan aspek ekonomi apalagi keuntungan. Nilai utama yang diperjuangkan oleh sektor publik adalah nilai-nilai keadilan sosial, efisiensi, kesamaan, kebijaksanaan, transparansi, kohesi sosial, orientasi pada pengguna, dan stabilitas. (Frederickson 2010; Jørgensen and Bozeman 2002).

Seiring dengan perkembangan perspektif *public value*, ada nilai-nilai lain yang dikembangkan, salah satunya berkaitan dengan bisnis di sektor publik (Thomson & Rizova, 2013). Relasi antara bisnis dan pemerintah berkaitan dengan bagaimana menghasilkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan nilai utama yang dikembangkan perspektif New Public Management (NPM). Sebagaimana disampaikan oleh Hood (1991) bahwa NPM memberikan pandangan tentang manajemen profesional yang di dalamnya menuntut adanya pengukuran kinerja, pengawasan terhadap pencapaian outcome, dan juga persaingan. Meskipun berat dilakukan oleh pemerintah, namun nilai-nilai NPM akan dapat membantu pemerintah merancang dan melaksanakan pelayanan baru yang lebih baik atau meningkatkan output (Barzelay & Thompson, 2006). Pada akhirnya kinerja pemerintah yang demikian akan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Dalam pandangan Bozic & Botric (2016), hubungan antara bisnis dan pemerintah berkaitan dengan peran lingkungan bisnis dalam memberikan pengaruh terhadap inovasi, kreativitas, kewirausahaan ke dalam lingkungan pemerintah atau sektor publik. Demikian pula sebaliknya, peran pemerintah adalah mengembangkan kebijakan yang mendorong potensi ekonomi masyarakat, sehingga mestinya pemerintah memahami bagaimana sebuah bisnis dijalankan.

Menciptakan pemerintah yang inovatif adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Dengan demikian, tugas pemerintah adalah merangsang agar inovasi itu dapat dilakukan oleh sektor publik. Hasil penelitian Bozic & Botric (2016) menunjukkan bahwa dalam menjalankan bisnisnya perusahaan swasta seringkali mengalami hambatan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah yang tidak memiliki relasi dengan bisnis akan cenderung menghambat perkembangan perusahaan swasta. Oleh sebab itu, ke depan pemerintah yang inovatif adalah pemerintah yang mampu membuat kebijakan yang merangsang ekonomi masyarakat.

Hubungan antara pemerintah dengan sektor privat sebagian besar memandang sangat berkaitan dengan derajat keterlibatan pemerintah dalam menjaga kestabilan pasar. Beberapa ahli telah meneliti hubungan pemerintah dan bisnis dengan melihat berbagai kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat, orientasi kewirausahaan pemerintah, serta bagaimana pemerintah mengembangkan sektor bisnis yang dijalankan oleh pemerintah sendiri. Seperti contoh di Cina, dengan kebijakan yang sangat berorientasi pada semangat kewirausahaan, perkembangan bisnis di Cina menjadi sangat maju (Dai & Si, 2018). Di tingkat lokal, pemerintah juga disarankan untuk mengembangkan bisnis sebagaimana dijalankan sektor privat. Hal inilah yang sedang dilakukan di Indonesia melalui kebijakan otonomi desa.

Pentingnya mengembangkan kultur kewirausahaan pada sektor publik juga dijelaskan oleh Minniti (2008) bahwa keputusan kewirausahaan yang dibuat pemerintah dalam lingkungan kelembagaan yang berorientasi pada kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha di sektor publik dan privat. Pengamatan yang dilakukan Gao et.al (2017) membuktikan bahwa lingkungan kelembagaan sangat mempengaruhi situasi pasar. Perubahan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perubahan kondisi pasar, faktor produksi, bahan baku, dan sebagainya. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa pemerintah perlu berorientasi pada *entrepreneurship*. Pemerintah Cina sangat kuat dalam mengendalikan sumber daya penting seperti tanah dan dana masyarakat sehingga campur tangan pemerintah Cina terhadap ranah tersebut sangat tinggi (Gao, 2007).

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan hasil penelitian Bozic & Botric (2016) dan Dai & Si (2018) yang menjelaskan bahwa relasi bisnis-pemerintah ditunjukkan oleh adanya beberapa variabel yaitu kapasitas bisnis (*business capacity*), semangat kewirausahaan (*public sector entrepreneurship*), dan komitmen bisnis (*business commitment*). Semangat kewirausahaan dan komitmen bisnis pemerintah akan memberikan pengaruh terhadap kapasitas bisnis yang dimiliki oleh pemerintah. Pada akhirnya relasi atau keterkaitan bisnis-pemerintah ditunjukkan oleh seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menjalankan bisnis.

Kapasitas Bisnis

Pengembangan kapasitas bisnis memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sebuah organisasi bisnis. Kapasitas bisnis merupakan kemampuan bisnis yang dalam hal ini dimiliki oleh pemerintah desa dalam menjalankan bisnis desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Kapasitas bisnis dapat dikembangkan melalui upaya meningkatkan jejaring usaha, inovasi, dan upaya kreatif lainnya yang diharapkan dapat membangun kerangka kelembagaan yang kuat (Fitriati, 2015).

Kapasitas bisnis merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah dalam menjalankan bisnis yang disatu sisi bertindak sebagai perusahaan publik yang beroperasi secara komersial, efisien, dan profitabel, namun disisi yang lain juga berkaitan dengan bagaimana mencapai keadilan sosial dalam hal penyediaan barang publik dan jasa dengan harga yang murah, merangsang kebutuhan tenaga tenaga kerja dan sebagainya (Debie& Felix, 2018).

Kapasitas bisnis dalam pandangan Ilmu ekonomi lebih melihat pada bagaimana kemampuan pemerintah dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang berarti berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu kapasitas bisnis juga merupakan kemampuan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (*public interest*) disamping juga mendapatkan keuntungan. (Debie & Felix, 2018).

Dengan demikian kapasitas bisnis merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam menghasilkan kinerja bisnis yang dijalankannya. Kapasitas bisnis berhubungan dengan volume kerja yang mampu dihasilkan oleh organisasi, team, atau individu. Untuk mengukur kapasitas bisnis pemerintah desa, telah ditetapkan 3 indikator kapasitas bisnis pemerintah desa, yaitu ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomi (*value for money*) dari bisnis desa yang dijalankan oleh pemerintah desa.

Public Sector Entrepreneurship (PSE)

Perkembangan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia membuat para pemikir administrasi publik mulai memperhitungkan hubungan antara sektor privat dalam pengaruhnya terhadap sektor publik (Klein, et.al, 2010; Reinhart and Rogoff, 2009). Untuk menjalankan bisnis, pemerintah dapat mengadopsi nilai-nilai kewirausahaan yang diperoleh dari sektor privat. Beberapa nilai yang menjadi karakteristik dari konsep kewirausahaan adalah kemampuan melihat peluang, pengambilan keputusan berisiko secara tepat, dan kemampuan memobilisasi sumber daya yang tersedia (Saiman, 2009).

Pemerintah saat ini telah banyak mengembangkan program-program inovasi, kreativitas, dan juga mulai mengutamakan output dan *outcome* dari kinerja organisasi. Artinya bahwa semangat kewirausahaan yang dimiliki sektor privat mulai memberikan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, di sisi yang lain dari pihak pemerintah, komitmen untuk menjadi entrepreneurial government juga semakin meningkat (Klein et.al, 2010).

Ditegaskan oleh McGahan et.al (2013) bahwa untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi publik saat ini, pemerintah membutuhkan konsep PSE. Menurut Dhliwayo (2017), penelitian tentang *Public Sector Entrepreneurship* masih cenderung jarang dilakukan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan PSE yaitu fasilitasi ekonomi dan kebijakan, lembaga politik, dan partisipasi pasar komersial.

Perkembangan bisnis pemerintah menunjukkan bahwa semangat PSE telah mulai tumbuh dan berkembang. Konsep PSE diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya. Beberapa konsep Entrepreneurship yang telah dikembangkan oleh para ahli antara lain adalah tentang model *corporate entrepreneurship* dari Klein et. al (2010), konsep *development of public sector* dari Kearney et.al (2008), dan konsep *entrepreneurial state* dari Mazzucato (2013).

Kewirausahaan menurut pendapat Sama et.al (2014) adalah sebuah konsep atau disiplin yang menghasilkan dampak terhadap sosial ekonomi, psikologis, hukum, politik, dan sebagainya. Untuk menjalankan wirausaha, organisasi atau seseorang membutuhkan kemampuan dalam pengambilan risiko, kreativitas, dan inovasi. Artinya, dalam membangun sebuah bisnis, organisasi atau individu harus dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki secara kreatif dan inovatif. Seringkali yang terjadi justru adanya struktur dan formalitas organisasi menjadi hambatan khususnya dalam organisasi sektor publik.

Dalam pengelolaan bisnis pemerintah, pandangan *Agency Theory* menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan yang kemungkinan terjadi antara agen (*manager*) dan principal (*owner*) (Eisenhardt, 1989; Linder & Foss, 2015). Konflik yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan usaha milik pemerintah antara lain berkaitan dengan pembagian keuntungan antar *shareholders*, keputusan kepada siapa pelayanan diberikan, konflik tentang pengawasan dan kewenangan-kewenangan lainnya (Ghosh & Whalley, 2008; Hoskisson, Hitt, Johnson, & Grossman, 2002; Jensen, 2001; Loderer, Roth, Waelchli, & Joerg, 2010). Pandangan *agency theory* merupakan konsekuensi lahirnya sistem manajemen modern yang menghendaki adanya pemisahan yang jelas antara pemilik modal (*owner*) dan pengelola (*manager*).

Komitment Bisnis

Komitmen merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh organisasi maupun anggotanya dalam rangka mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Komitmen merupakan *mind-set* atau pola pikir yang menjadi kekuatan organisasi yang dapat mengarahkan organisasi untuk bertindak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, komitmen merupakan kekuatan yang menggerakkan organisasi dan anggotanya untuk berkontribusi dalam meningkatkan kinerja (Wainwright, 2019).

Komitmen organisasi merupakan kemauan dari organisasi untuk melakukan sesuatu menuju hal yang lebih baik. Komitmen memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan kinerja organisasi.

(Fu & Deshpande, 2014). Komitmen merupakan semangat yang harus dimiliki oleh organisasi dan juga individu dalam menjalankan organisasinya.

Terkait dengan bisnis, maka komitmen yang dimaksud adalah kemauan (*willingness*) dari organisasi dalam hal ini adalah pemerintah dalam menjalankan bisnis sesuai dengan aturan-aturan bisnis. Namun demikian, dijelaskan oleh Debie dan Felix (2018) bahwa bisnis yang dijalankan sektor publik memang tidak hanya berkaitan dengan upaya mendapatkan profit atau keuntungan, tetapi juga bagaimana membangun ekonomi masyarakat dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial. Komitmen bisnis yang dimiliki pemerintah merupakan wujud keberpihakan dan orientasi pemerintah terhadap upaya pengembangan bisnis yang dilakukan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini komitmen pemerintah desa dinilai melalui adanya dukungan kebijakan, dukungan pendanaan, dan dukungan sumberdaya manusia yang diberikan kepada unit usaha desa sebagai wujud *willingness* atau kemauan yang dimiliki oleh pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan *Public Sector Entrepreneurship* dan komitmen bisnis pemerintah terhadap kapasitas bisnis pemerintah di tingkat lokal. Responden dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di Kabupaten Banyumas yang diambil sebanyak 115 desa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada masyarakat desa dan juga pengelola unit bisnis desa. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis korelasi dan regresi ordinal yang didukung hasil wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas bisnis pemerintah desa

Kapasitas bisnis merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam menghasilkan kinerja bisnis yang dijalanannya. Kapasitas bisnis berhubungan dengan volume kerja yang mampu dihasilkan oleh organisasi, team, atau individu. Untuk mengukur kapasitas bisnis pemerintah desa, telah ditetapkan 3 indikator kapasitas bisnis pemerintah desa, yaitu ketercapaian efisiensi, efektivitas, dan juga ekonomi (*value for money*) dari bisnis desa yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum kapasitas bisnis yang dimiliki pemerintah desa di 115 sampel yang diteliti belum menunjukkan hasil yang optimal. Perkembangan bisnis pemerintah di tingkat lokal memang masih dalam tahap pengembangan bahkan inisiasi. Pengelolaan bisnis pemerintah masih dilakukan dengan pola yang sederhana, sehingga nilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi belum dapat dihasilkan secara optimal oleh unit bisnis pemerintah di tingkat lokal. Namun demikian dari 115 desa yang diteliti, sebagian besar sudah menuju pada tahap pengembangan dengan nilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi yang cukup baik. Berikut ditunjukkan hasil pengukuran terhadap kapasitas bisnis pemerintah di tingkat lokal.

Tabel 1. Kapasitas Bisnis Pemerintah Desa

Kategori	Frekuensi	Persentase
Maju	23	20%
Berkembang	70	61%
Inisiatif	22	19%
	115	100%

Sumber: data primer diolah, 2019.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kapasitas bisnis yang dihasilkan pemerintah desa memang masih belum optimal. Penyebabnya adalah hampir sebagian besar pengelolaan bisnis masih dikuasai oleh perangkat desa. Dominasi kepala desa menjadi hambatan tersendiri dalam meningkatkan kinerja organisasi bisnis. Akibatnya kapasitas desa dalam membangun bisnisnya belum dapat tercapai secara optimal. Analisis tersebut sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh para penganut pandangan *Agency Theory* bahwa dalam mengelola bisnis milik pemerintah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara agen (manajer) dengan principal (owner) akan sangat tinggi. Konflik yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan usaha milik pemerintah antara lain berkaitan dengan pembagian

keuntungan antar *shareholders*, keputusan kepada siapa pelayanan diberikan, konflik tentang pengawasan dan kewenangan-kewenangan lainnya (Ghosh & Whalley, 2008; Hoskisson, Hitt, Johnson, & Grossman, 2002; Jensen, 2001; Loderer, Roth, Waelchli, & Joerg, 2010).

Public Sector Entrepreneurship (PSE)

Faktor penting dalam mendukung kapasitas bisnis pemerintah di tingkat lokal berkaitan erat dengan PSE. Pengukuran terhadap PSE dilakukan dengan menggunakan indikator kreatifitas bisnis, kerjasama bisnis, dan profesionalisme yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSE yang dimiliki pemerintah desa cukup besar dalam mendukung kapasitas bisnis pemerintah. Lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direspon cepat oleh pemerintah desa dengan mengembangkan kreativitas serta kerjasama bisnis. Perkembangan jumlah unit bisnis pemerintah di tingkat lokal dapat dikatakan masif. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyumas yang terus meningkat dari 88 usaha di tahun 2016 menjadi 126 unit di tahun 2018. Hasil pengukuran terkait PSE dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kategorisasi *Public Sector Entrepreneurship*

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tinggi (kreatif, terbuka, dan profesional)	20	17%
Sedang (terbuka dan profesional)	76	66%
Rendah	19	17%
	115	100%

Sumber: data primer diolah, 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh pemerintah desa masuk kategori sedang. Semangat kewirausahaan ditunjukkan dengan adanya keterbukaan dalam mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi, dan peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan. Dijelaskan oleh Sama et.al (2014) bahwa *Public Sector Entrepreneurship* yang dijalankan oleh pemerintah akan dapat memberikan dampak bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Komitmen Bisnis

Untuk mendukung peningkatan kapasitas bisnis pemerintah diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah desa. Komitmen bisnis yang dimiliki pemerintah merupakan wujud keberpihakan dan orientasi pemerintah terhadap upaya pengembangan bisnis yang dilakukan. Komitmen pemerintah desa dapat dinilai dari adanya dukungan kebijakan, dukungan pendanaan, dan dukungan sumberdaya manusia yang diberikan kepada unit usaha desa. Dari ketiga aspek tersebut dukungan kebijakan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menentukan kapasitas bisnis pemerintah. Berikut hasil penelitian terkait dengan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas bisnis desa.

Tabel 3. Kategorisasi Komitmen Bisnis

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tinggi (kebijakan, dana, SDM)	80	70%
Sedang (kebijakan dan dana)	19	17%
Rendah	16	14%
	115	100%

Sumber: data primer diolah, 2019.

Sebagaimana disampaikan oleh Bozic & Botric (2016) bahwa peran pemerintah dalam kaitannya dengan pengembangan bisnis adalah membuat kebijakan yang mendorong semangat kewirausahaan. Hal ini telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik

Desa sebagai motor penggerak pembangunan desa. Namun demikian, dengan dukungan sumber daya manusia yang masih lemah, maka kapasitas bisnis pemerintah belum mencapai hasil yang optimal.

Bisnis-Government Relationship

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan hubungan sektor bisnis dan pemerintah yang dibangun di Kabupaten Banyumas sudah cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh *public sector entrepreneurship* dan komitmen bisnis yang dimiliki pemerintah desa terhadap kapasitas bisnis desa. Peran sektor non-pemerintah harus diberi ruang yang cukup dalam ikut mendukung komitmen bisnis pemerintah. Selain itu peran yang diberikan oleh LSM dan organisasi nirlaba lainnya juga memiliki andil yang cukup besar. Hubungan antara variabel independen dan variabel dependen ditunjukkan dalam hasil analisis statistik berikut.

Tabel 4. Koefisien korelasi dengan Kapasitas Bisnis

Variable	Coefficient correlation Kendall	Probability
Public Sector Entrepreneurship	0,683271	0,00049
Komitmen bisnis	0,732465	0,00019

Sumber : data primer diolah, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa *Public Sector Entrepreneurship* memiliki korelasi kuat dengan kapasitas bisnis pemerintah desa sebesar 68,3 persen. Hubungan antar variabel adalah positif yang berarti bahwa jika ada peningkatan *Public Sector Entrepreneurship* maka kapasitas bisnis akan meningkat, dan sebaliknya. Variabel komitmen bisnis yang juga terbukti memiliki korelasi kuat dengan kapasitas bisnis pemerintah desa sebesar 73,2 persen. Dengan arah korelasi positif, setiap peningkatan komitmen bisnis pemerintah diikuti oleh peningkatan kapasitas bisnis pemerintah.

Selanjutnya, untuk melihat hubungan antara dua variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama, telah dilakukan analisis korelasi konkordansi Kendall W dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Korelasi Konkordansi Kendall W Variabel PSE (X1) dan CB (X2) terhadap Kapasitas Bisnis Pemerintah Desa

Konkordansi Kendall W	Koefisien	Chi Square Hitung	Chi Square Tabel	Asymp. Sig	Keterangan
X1,X1.Y	0,728	124,065	5,991	0,000	Signifikan

Sumber: data primer diolah, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen memiliki korelasi yang sangat kuat terhadap variabel dependen. Sifat korelasi antar variabel adalah positif. Oleh karena itu, penelitian ini secara umum telah membuktikan bahwa *public sector entrepreneurship* dan komitmen bisnis memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kapasitas bisnis pemerintah desa. Kemudian, untuk menentukan pengaruh antar variabel, telah dilakukan pengukuran dengan menggunakan teknik regresi ordinal, dan hasilnya dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Pseudo R Square antara variabel dependen dan independen

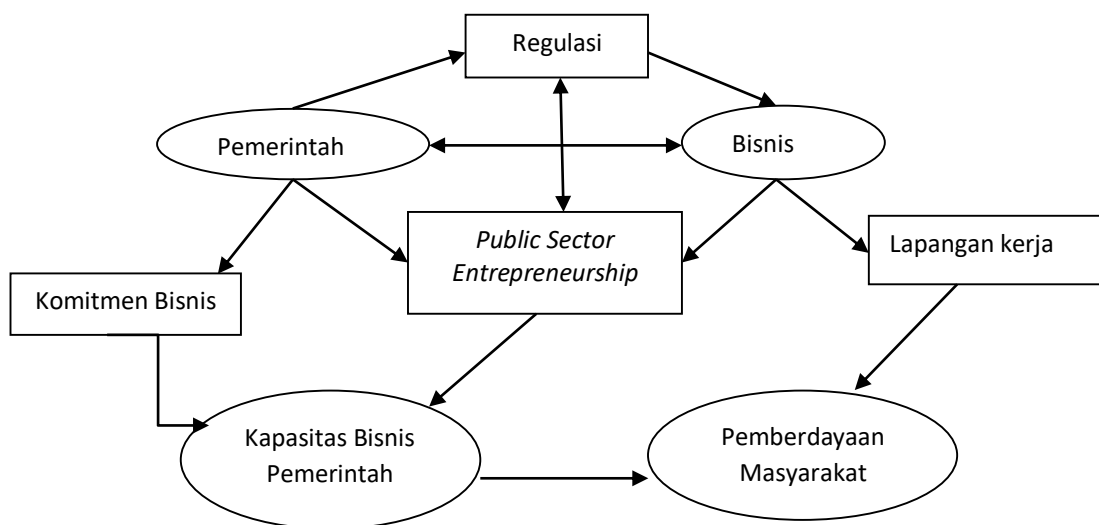
PSE	0,683
BC	0,771
PSE + BC	0,798

Sumber: data primer diolah, 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Public Sector Entrepreneurship* (PSE) terbukti mempengaruhi kapasitas bisnis pemerintah dengan nilai pengaruh sebesar 68 persen. Faktor lain yang juga berpengaruh pada kapasitas bisnis pemerintah adalah komitmen bisnis, yang memberikan

kontribusi 77,1 persen. Secara bersamaan, kedua variabel ini terbukti memiliki pengaruh sebesar 79,8 persen pada kapasitas bisnis desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan bisnis dan pemerintah mulai berkembang baik di Indonesia.

Hubungan bisnis-pemerintah di Indonesia telah diwujudkan melalui regulasi yang mendorong pengembangan bisnis pemerintah. Hal ini sejalan dengan pemikiran McGahan et.al (2013) yang menjelaskan ide menyelesaikan berbagai masalah publik melalui konsep *public sector entrepreneurship*. Pentingnya menjalin hubungan dengan sektor bisnis juga diungkapkan oleh Sama et.al (2014) yang menyatakan bahwa kewirausahaan akan berdampak pada resolusi sosial-ekonomi, psikologis, hukum, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia kini telah mulai mengembangkan sektor bisnis di ranah pemerintahan mulai dari level terendah, yaitu desa. Meskipun kapasitasnya belum optimal, semangat kewirausahaan dan komitmen bisnis dari pemerintah desa telah menunjukkan hasil yang baik. Keterkaitan antara sektor bisnis dan pemerintah dijelaskan dalam bagan berikut.



Gambar 2. Business-Government Relationship Pasca-Autonomy

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sektor bisnis dan pemerintah pasca implementasi otonomi desa memiliki sifat timbal balik. Pemerintah memberikan pengaruh kepada sektor bisnis melalui kebijakan yang dibuat untuk mengembangkan sektor bisnis, sedangkan sektor bisnis memberikan efek kemampuan kewirausahaan kepada sektor pemerintah sebagai stimulus untuk mengembangkan bisnis pemerintah. Hubungan tersebut membangkitkan semangat kewirausahaan dan komitmen bisnis pada sektor publik yang memengaruhi kapasitas bisnis pemerintah. Pengaruh *public sector entrepreneurship* dijelaskan oleh faktor kreativitas, kerjasama bisnis, dan profesionalisme. Sedangkan pengaruh komitmen bisnis dijelaskan melalui kebijakan, dukungan pendanaan, dan dukungan sumber daya manusia. Oleh karena itu, melalui kebijakan dari tingkat pusat, Indonesia setidaknya telah berhasil membangun budaya bisnis hingga ke tingkat pemerintah di tingkat bawah, yaitu desa. Keberhasilan ini diharapkan memiliki implikasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Acknowledgment

Penelitian ini dilakukan melalui pendanaan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak, terutama para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan bisnis pemerintahan desa di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyumas. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Jenderal Soedirman yang memfasilitasi kegiatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Acs, Z. J., & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy, *Small Business Economics*, 28(2–3), 109–122.
- Barzelay, M. & Thompson, F. (2006). Responsibility Budgeting in the Air Force Materiel Command, *Public Administration Review*, 66(1):127–38.
- Botric, V. & Bozic, L.(2016). Business Government Relationship in European Post Transition Countries: DO Innovators Get The Worse and of A Stick, *Transylvanian Review of Administrative Science*, 49: 5-21.
- Dai, W. & Si, S. (2018). Government Policies and Firm ‘Entrepreneurial Orientation: Strategic Choice and Institutional Perspectives, *Journal of Business Research*, 93: 23-36.
- Debbie, Robert.A & Felix, Edoho.M. (2018). *Business and Government Relations in Africa*, Routledge, New York and London.
- Dhliwayo, S. (2017). Defining public-sector entrepreneurship: A conceptual operational construct, *The International Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 20 (10): 1–11.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review, *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Fitriati, R. (2015). *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif, Sebuah Riset Tindakan berbasis Soft Systems Methodology*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fu, Weihui & Deshpande Satish.P. (2014). The Impact of Caring Climate, Job Satisfaction and Organizational Commitment on Job Performance of Employees in China’s Insurance Company, *Journal Business Ethic*, 124: 324-339.
- Frederickson, H. G. (2010) *Social Equity and Public Administration: Origins, Developments, and Applications*, Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Gao, Y., Lin, L. Y., & Yang, H. (2017). What's the value in it? Corporate giving under uncertainty, *Asia Pacific Journal of Management*, 34(1), 1–26.
- Ghosh, M., & Whalley, J. (2008). State owned enterprises, shirking and trade liberalization. *Economic Modelling*, 25(6), 1206–1215. Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons? Public Administration*, 69:1 pp3–19.
- Hoskisson, R. E., Hitt, M. A., Johnson, R. A., & Grossman, W. (2002). Conflicting voices: The effects of institutional ownership heterogeneity and internal governance on corporate innovation strategies. *Academy of Management Journal*, 45(4), 697–716.
- Inwood, G.J. (2012). *Understanding Canadian Public Administration: An Introduction Theory and Practice*, Toronto: Pearson, 2012.
- Jørgensen, T. B. & Bozeman, B. (2002) Public Values Lost? Comparing Cases on Contracting Out From Denmark and the United States. *Public Management Review*, 4:1 pp63–81.
- Jensen, M. (2001). Value maximisation, stakeholder theory, and the corporate objective function. *European Financial Management*, 7(3), 297–317.
- Kearney, C., R. Hisrich & F. Rochie. (2008). “Facilitating public sector corporate entrepreneurship process: A conceptual model”. *Journal of Enterprising Culture*, 15: 275–299.
- Klein, P.G., Mahoney, J.T., McGahan, A.M., & Pitelis, C.N. (2010). Toward a Theory of Public Entrepreneurship, *European Management Review*, 7: 1-15.
- Linder, S., & Foss, N. J. (2015). *Agency Theory*. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (hal. 344–350).
- Loderer, C., Roth, L., Waelchli, U., & Joerg, P. (2010). Shareholder value: Principles, declarations, and actions. *Financial Management*, 39(1), 5–32. <https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2009.01064.x>.

- Loderer, C., Roth, L., Waelchli, U., & Joerg, P. (2010). Shareholder value: Principles, declarations, and actions, *Financial Management*, 39(1), 5–32.
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Myths in Risk and Innovation*. London: Anthem Press.
- McGahan, A.M., Zelner, B.A., & Barney, J.B. (2013) Entrepreneurship in the public interest: Introduction to the public issue, *Strategic Entrepreneurship Journal*, 7(1): 1–5.
- Minniti, M. (2008). The role of government policy on entrepreneurial activity: Productive, unproductive, or destructive? *Entrepreneurship Theory and Practice*, 32(5), 779–790.
- Reinhart, C. & K. G. Rogoff, (2009), *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton, NJ: Princeton University.
- Sama, H.K., Ndunguru, P.C., Baisi, M.D. (2013). Entrepreneurial Government: Causal Relationship between Transaction Costs and Value for Money, *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)*, 2(9), 63-74.
- Saiman, L. (2009). *Kewirausahaan, Teori, Praktik dan Kasus-Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomson, F. & Rizova, P. (2013). Understanding and Creating Public Value, Business is The Engine, Government The Flywheel (and also The Regulator), *Public Management Review*, 17(4): 565-586.
- Wainwright, B. (2019). *What is Employee Commitment?*, Effectory.com.